



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

#### 1. Akuntansi Akruwal

##### a. Pengertian Akuntansi Akruwal

Akuntansi akrual menggambarkan pengaruh transaksi dan peristiwa dan keadaan lain pada sumber daya ekonomi entitas pelapor dan klaim dalam periode di mana pengaruh tersebut terjadi, bahkan jika penerimaan dan pembayaran kas yang dihasilkan terjadi pada periode yang berbeda. Hal ini penting karena informasi tentang sumber daya dan klaim ekonomi entitas pelapor dan perubahan sumber daya ekonomik dan klaim selama suatu periode memberikan dasar yang lebih baik untuk menilai kinerja entitas di masa lalu dan masa depan daripada informasi semata-mata tentang penerimaan dan pembayaran kas selama periode tersebut (*Conceptual Framework for Financial Reporting*, IFRS 2018).

Kerangka konseptual dalam *Financial Accounting Standard Board* (FASB) menjelaskan akuntansi akrual sebagai berikut:

*“Accrual accounting attempts to record the financial effects on an entity of transactions and other events and circumstances that have cash consequences for the entity in the periods in which those transactions, events, and circumstances occur rather than only in the periods in which cash is received or paid by the entity” [FASB 1985, SFAC No. 6, para 139].*

*“Accrual accounting uses accrual, deferral, and allocation procedures whose goal is to relate revenues, expenses, gains, and losses to periods to reflect an entity’s performance during a period instead of merely listing its cash receipts and outlays” [FASB 1985, SFAC No. 6, para 145].*

*“Accrual is concerned with expected future cash receipts and payments: it is the accounting process of recognizing assets or liabilities and the related liabilities, assets, revenues, expenses, gains, or losses for amounts expected to be received or paid, usually in cash, in the future. Deferral is concerned with past cash receipts and payments—with prepayments received (often described as collected in advance) or paid: it is the accounting process of recognizing a liability resulting from a current cash receipt (or the equivalent) or an asset resulting from a current cash payment (or the equivalent) with deferred recognition of revenues, expenses, gains, or losses” [FASB 1985, SFAC No. 6, para 141].*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Akuntansi akrual ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang konsekuensi aktivitas bisnis untuk arus kas masa depan perusahaan sesegera mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Hal ini dicapai dengan mengakui pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi, terlepas dari apakah arus kas terjadi secara bersamaan atau tidak. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dari arus kas difasilitasi dengan penyesuaian akrual, yang menyesuaikan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk menghasilkan pendapatan dan beban. Penyesuaian akrual dicatat setelah asumsi dan estimasi yang wajar dibuat tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material (Subramanyam, 2014).

Akuntansi berbasis akrual berarti perusahaan mencatat peristiwa yang mengubah laporan keuangan perusahaan pada periode terjadinya peristiwa tersebut, bukan pada periode di mana perusahaan menerima atau membayar uang tunai. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan mengakui pendapatan pada periode di mana kewajiban dipenuhi dan mengakui beban pada periode terjadinya (Weygandt *et al.*, 2018).

Akuntansi akrual memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi yang relevan terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, serta untuk memprediksi arus kas di masa depan yang dijelaskan sebagai berikut (Subramanyam, 2014):

- (1) Kinerja keuangan: pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya menghasilkan jumlah laba yang lebih unggul daripada arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan semua pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode dicatat. Pencocokan memastikan bahwa hanya biaya yang terkait dengan pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode yang dicatat.
- (2) Kondisi keuangan: akuntansi akrual menghasilkan neraca yang lebih akurat dalam mencerminkan tingkat sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Prediksi arus kas masa depan: ada dua alasan mengapa laba akrual adalah prediktor yang unggul dalam memprediksi arus kas masa depan daripada arus kas saat ini. Pertama, konsekuensi arus kas masa depan dapat dicerminkan melalui pengakuan pendapatan. Kedua, akuntansi akrual lebih baik menyelaraskan arus masuk dan arus keluar dari waktu ke waktu melalui proses pencocokan.

*Statement of Financial Accounting Concepts No. 1* (FASB, 1978) menyatakan bahwa informasi tentang pendapatan perusahaan berdasarkan akuntansi akrual umumnya memberikan indikasi yang lebih baik dari kemampuan perusahaan saat ini dan berkelanjutan untuk menghasilkan arus kas daripada informasi yang terbatas pada aspek keuangan penerimaan dan pembayaran kas.

Menurut penentang dan pengkritik akuntansi akrual, ada beberapa kelemahan yang dimiliki. Akuntansi akrual adalah campuran aturan yang kompleks dan tidak sempurna sehingga membuat tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang arus kas dan kapasitas menghasilkan kas menjadi tidak jelas. Kritik terekstrim menyatakan bahwa akuntansi akrual adalah pengalihan dan gangguan yang merusak proses penyebaran informasi. Kritikus ini menyatakan bahwa tujuan analisis keuangan adalah untuk menghilangkan selubung akuntansi akrual dan mendapatkan arus kas yang mendasarinya. Kerumitan dan kerentanan akuntansi akrual terhadap manipulasi oleh manajer membuatnya terganggu (Subramanyam, 2014).

b. Pendeteksian Abnormal Akrual

Analisis manajemen laba sering berfokus pada penggunaan akrual diskresioner oleh manajemen. Penelitian tersebut membutuhkan model yang memperkirakan komponen diskresioner dari laba yang dilaporkan. Model yang ada berkisar dari model sederhana di mana akrual diskresioner diukur sebagai total akrual, hingga model yang lebih canggih yang mencoba memisahkan total akrual menjadi komponen diskresioner dan non-diskresi.



Penelitian Dechow *et al.* (2012) menguji beberapa model yang dapat digunakan untuk menguji pendeteksian abnormal akrual sebagai berikut:

### 1. Healy Model (1985)

Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual di seluruh variabel partisi manajemen laba. Studi Healy berbeda dari kebanyakan studi manajemen laba lainnya karena ia memprediksi bahwa manajemen laba sistematis terjadi di setiap periode. Variabel partisinya membagi sampel menjadi tiga kelompok, dengan pendapatan diprediksi akan dikelola ke atas di salah satu kelompok dan ke bawah di dua kelompok lainnya. Inferensi kemudian dibuat melalui perbandingan berpasangan dari rata-rata total akrual dalam kelompok di mana pendapatan diprediksi akan dikelola ke atas dengan rata-rata total akrual untuk masing-masing kelompok di mana pendapatan diprediksi akan dikelola ke bawah. Pendekatan ini ekuivalen dengan memperlakukan kumpulan pengamatan yang pendapatannya diprediksi akan dikelola ke atas sebagai periode estimasi dan kumpulan pengamatan yang pendapatannya diprediksi akan dikelola ke bawah sebagai periode peristiwa. Total akrual rata-rata dari periode estimasi kemudian mewakili ukuran akrual non-diskresioner.

$$NDA_{\tau} = \frac{\sum_{t} TA_{\tau}}{T}$$

Keterangan:

$NDA$  = *estimated nondiscretionary accruals*;

$TA$  = *total accruals scaled by lagged total assets*;

$t = 1, 2, \dots, T$  is a year subscript for years included in the estimation period;

$\tau$  = *a year subscript indicating a year in the event period*;

### 2. Jones Model (1991)

Model ini menegaskan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* tidak konstan. Jones (1991) menambahkan perubahan dalam penjualan dan jumlah kotor aset tetap ke model

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





kas akrual. Dengan kata lain, ketika Dechow dan Dichev (2002) mengevaluasi kualitas akrual, mereka mempertimbangkan apakah akrual berubah menjadi uang tunai atau tidak di tahun berikutnya. Untuk mendorong ukuran praktis kualitas akrual modal kerja, Dechow dan Dichev (2002) menggunakan regresi deret waktu tingkat perusahaan berikut.

$$\Delta WC_t = b_0 + b_1 CFO_{t-1} + b_2 CFO_t + b_3 CFO_{t+1} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$\Delta WC_t$  = the change in working capital from year t – 1 to t;

$CFO_{t-1}$  = the cash flows that created cash flows in previous period but the effect of them on the earnings took place in period t;

$CFO_t$  = the cash flows that both create cash flows and affect the earnings in the period t;

$CFO_{t+1}$  = the cash flows that affect the earnings in the period t although they will create cash flows in the following period;

$\varepsilon_t$  = represents accruals that are not turned into cash and their standard deviation is considered as the measure of the firm's accrual quality

#### 5. McNichols (2002)

Hasil estimasi pada Model Dechow dan Dichev (2002) mengungkapkan bahwa penambahan arus kas pada Model Jones (1991) akan mengurangi pelangkahan model (*model's skipping*) variabel mengenai peristiwa ekonomi. Dalam konteks itu, McNichols (2002) juga menyatakan bahwa kesalahan pengukuran dalam Model Dechow dan Dichev (2002) dapat menghambat pengendalian efektif dari variabel dasar yang mempengaruhi akrual. Itulah sebabnya menambahkan variabel laba (*earnings*) ke Model Dechow dan Dichev (2002) terdiri dari titik pemeriksaan yang berguna berkaitan dengan pengukuran kesalahan dalam nilai arus kas. Dalam penelitian tersebut, fakta apakah arus kas memiliki penjelas atas akrual atau tidak setelah perubahan aset tetap dan laba dipertimbangkan dikemukakan dengan model berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Milik Bina Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\Delta WC_t = b_0 + b_1CFO_{t-1} + b_2CFO_t + b_3CFO_{t+1} + b_4\Delta Sales_t + b_5PPE_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$\Delta Sales_t$  = the change in sales;

$PPE_t$  = Gross property plant and equipment in year  $\tau$  scaled by total assets at  $t - 1$

## 2. Kinerja Keuangan

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan paragraf 12-14 (PSAK, 2015), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kinerja adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya dengan berbagai cara yang berbeda untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Kinerja perusahaan sangat penting bagi manajemen, karena merupakan hasil yang dicapai baik secara individu maupun berkelompok yang terdapat dalam perusahaan yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan (Kazimoto, 2016).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016) mengartikan kinerja keuangan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Kinerja perusahaan dapat diukur berdasarkan kinerja pasar dan kinerja operasional, yang diuraikan sebagai berikut:

### a. Kinerja Pasar (*Market Performance*)

Kinerja pasar adalah ukuran kekayaan pemegang saham dari satu periode ke periode berikutnya berdasarkan deviden yang mereka terima. Para pengguna laporan keuangan seringkali menggunakan nilai *Price to Book Value* (PBV) dan *Price to Earnings Ratio* (PER) dalam pengambilan keputusan investasi (Subramanyam, 2014; Damodaran, 2002).



### 1. *Price to Book Value* (PBV)

Rasio keuangan ini dihitung dengan cara membagi harga pasar per saham dengan nilai buku saat ini dari ekuitas per saham.

$$PBV = \frac{\text{Market Value of Equity}}{\text{Book Value of Equity}}$$

*Book Value of Equity* adalah hasil perhitungan dari total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dengan kata lain, rasio ini membandingkan nilai saham investasi perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan dengan PBV di bawah angka satu (1) dianggap sebagai perusahaan yang gagal menciptakan *value* bagi para pemegang saham.

### *Price to Earnings Ratio* (PER)

Rasio ini dihitung dengan cara mengukur rasio harga pasar per saham terhadap laba per saham (Damodaran, 2002).

$$PER = \frac{\text{Market Value of Equity}}{\text{Earnings per Share}}$$

*Earnings per Share* merupakan hasil perhitungan dari laba bersih yang dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Semakin tinggi rasio PER, maka menunjukkan bahwa pasar bersedia membayar lebih terhadap pendapatan atau laba suatu perusahaan, serta memiliki harapan yang tinggi terhadap masa depan perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah rasio PER suatu perusahaan, menunjukkan bahwa pasar tidak memiliki kepercayaan terhadap kinerja perusahaan tersebut.

Pengukuran "*Tobin's Q*" juga seringkali digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja pasar. James Tobin (1977) menghadirkan alternatif pengukuran nilai dengan membandingkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





nilai pasar suatu asset terhadap biaya penggantinya. Tobins'Q juga menentukan seberapa efisien suatu perusahaan mengatur aset yang dimilikinya (Damodaran, 2002).

Rasio Tobin's Q mengukur nilai pasar suatu perusahaan, dengan menghitung nilai kapitalisasi pasar dan hutang lalu dibagi dengan biaya pengganti aset. Rasio ini berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Nilai rasio yang kurang dari satu menunjukkan bahwa biaya pengganti aktiva lebih besar dari nilai pasar perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio Tobin's Q yang lebih tinggi cenderung lebih menarik peluang investasi. Secara konseptual, rasio Tobin's Q lebih unggul karena lebih memfokuskan kepada nilai perusahaan secara relatif saat ini terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikannya. Tobin's Q dirumuskan sebagai berikut (Huang dan Liu, 2010):

$$\text{Tobin's } Q = \frac{(MVE - BVE) + BVE}{BVA}$$

Keterangan:

MVE = *Market Value of Equity*

BVE = *Book Value of Equity*

BVA = *Book Value of Assets*

Namun, rumus Tobin's Q menurut Jian & Wong (2014) adalah sebagai berikut:

$$\text{Tobin's } Q = \frac{(\text{Price} \times \text{Number of Outstanding}) + BVE}{BVA}$$

b. Kinerja Operasional (*Operating Performance*)

Aktivitas operasi merupakan aktivitas inti dan sumber laba perusahaan yang utama, juga merupakan seluruh aktivitas untuk menghasilkan produk dan jasa serta melayani kebutuhan pelanggan. Analisa laba atau profitabilitas dilakukan dengan menghitung rasio angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Contohnya *gross profit margin*, dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan. Lalu *operating profit margin* dihitung dengan membagi pendapatan operasi dengan penjualan dan *net profit margin* dihitung dengan membagi pendapatan bersih terhadap penjualan (Subramanyam, 2014).





ROA menunjukkan efisiensi perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan sebelum efek pembiayaan (Damodaran, 2002).

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

EBIT = *Earnings Before Interest and Taxes*

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi apakah manajemen telah menghasilkan laba yang masuk akal melalui aset yang berada di bawah kontrolnya. Laba yang dimaksud adalah laba operasi, karena biaya bunga dan biaya pajak penghasilan ditentukan oleh faktor yang berada diluar penggunaan aset (Williams *et al.*, 2018).

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Operating Income}}{\text{Average Total Assets}}$$

Semakin besar rasio ROA, maka menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, disebabkan tingkat pengembalian investasi yang semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva atau pendanaan yang diberikan pada perusahaan (Subramanyam, 2014).

### 3. Keragaman Gender dalam Dunia Kerja

Pada tahun 2015, wanita yang menduduki jabatan dewan dalam perusahaan di seluruh dunia hanya sebesar 14,7%. Dengan kurangnya keragaman gender ini menunjukkan keterbelakangan sistemik dari sumber daya manusia yang berharga, dan mencerminkan kurangnya pemanfaatan potensi kepemimpinan strategis yang parah. Di Asia Tenggara, negara yang paling menghargai kesetaraan gender adalah Filipina dan Singapura. Beberapa negara lain di kawasan ini, termasuk Indonesia, memiliki orientasi yang kurang sederajat. Sikap berbasis budaya ini tercermin dalam komposisi dewan direksi perusahaan. Filipina memiliki tingkat partisipasi wanita tertinggi di kawasan ini, dengan wanita menempati sekitar 13% dari jabatan direktur di perusahaan terbesarnya. Indonesia, dengan sikap yang paling tidak sederajat di kawasan ini, memiliki tingkat partisipasi pemerintahan wanita sebesar 10% (Investinginwomen.asia, 2017).





Karakteristik gender yang unik dapat dilihat dalam pengambilan keputusan dan pengambilan risiko. Literatur menunjukkan bahwa wanita cenderung mengambil risiko lebih sedikit daripada pria (Barber & Odean, 2001). Kesimpulan dari literatur tentang direksi wanita tampaknya konsisten dengan yang ditemukan untuk manajer wanita sehubungan dengan wanita memiliki standar etika yang lebih tinggi dan penghindaran risiko yang lebih bear daripada pria, lebih bermain oleh pertimbangan moral daripada dengan pertimbangan prestasi diri, melengkapinya dalam manajemen dan membawa keseimbangan yang sehat untuk bisnis. Semua ini konsisten dengan harapan bahwa kehadiran direktur wanita akan meningkatkan pemantauan dan pengawasan dewan (Terjesen *et al.*, 2009) dalam hal mencegah atau mengoreksi perilaku oportunistik seperti manajemen laba.

Di Indonesia, tidak ada minimal kuota untuk mengatur wanita yang menjabat di dewan direksi. Namun, ada persyaratan bahwa sepertiga dari calon dari setiap partai politik harus wanita dalam pemilihan parlemen. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah wanita yang menjabat di parlemen meski tidak pada tingkat yang diharapkan. Keterwakilan wanita di parlemen saat ini berada di level tertinggi, yaitu 20,5% (Deloitte, 2019). Tidak ada referensi tentang keragaman gender di ruang dewan atau representasi perempuan di dewan dalam pedoman tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh badan pengatur Indonesia seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dewan pengawas keuangan OJK.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 untuk mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Inpres tersebut merupakan instruksi kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat nasional dan/atau daerah untuk menempatkan perspektif kesetaraan gender dalam semua aspek agenda pembangunan nasional, serta didukung dan dibantu melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Tidak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

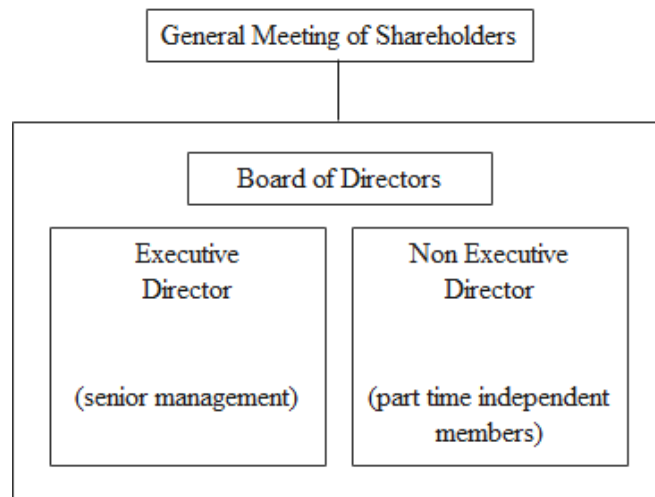


Ketenagakerjaan Pasal 5 menjelaskan bahwa: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

#### 4. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

Terdapat dua sistem hukum dalam bentuk dewan perusahaan, yaitu Anglo Saxon dan Kontinental Eropa. Sistem Hukum Anglo Saxon memiliki *One-Tier Board System* atau sistem satu tingkat, yang berarti perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan gabungan manajer atau *executive* dengan direktur *non-executive*. Inggris Raya, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara hukum umum lainnya biasanya menggunakan *One-Tier Board System*.

**Gambar 2.1**  
**Struktur *One-Tier Board System***



Source: Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001)

Sistem Hukum Kontinental Eropa memiliki *Two-Tier Board System* atau sistem dua tingkat. Artinya dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah, yaitu dewan komisaris sebagai pengarah, serta pengawas dan dewan direksi sebagai manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem dua tingkat umumnya digunakan di yurisdiksi hukum perdata lainnya seperti Indonesia, Belanda, Jerman, dan banyak negara Eropa Timur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

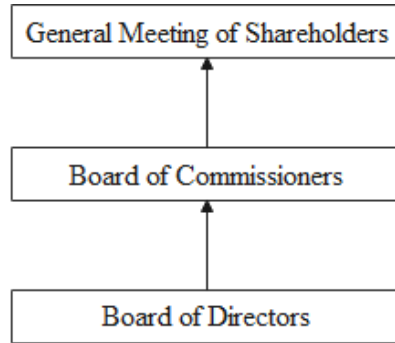
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Gambar 2.2**

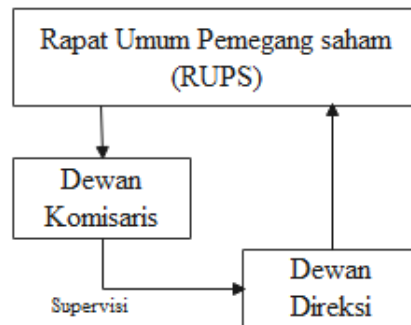
**Struktur Two-Tier Board System Belanda**



Source: *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001)

**Gambar 2.3**

**Struktur Two-Tier Board System Indonesia**



Source: *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001)

Menurut OECD (2015), perusahaan memiliki praktik yang baik apabila kebijakan dan kontrak remunerasi untuk anggota dewan dan eksekutif kunci ditangani oleh komite khusus dewan yang terdiri dari seluruh atau mayoritas direktur independen dan tidak termasuk eksekutif yang bertugas di komite remunerasi masing-masing, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan transparan dan dihormati. Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk membentuk komite khusus untuk mendukung penuh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam hal audit, dan, tergantung pada ukuran dan profil risiko perusahaan, juga dalam



hal manajemen risiko dan remunerasi. Pembentukan komite dewan dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi direksi perusahaan, memperkuat kompetensi mereka dan mendukung tanggung jawab kritis mereka. Mereka mungkin juga efektif dalam mengubah budaya dewan dan memperkuat independensi dan legitimasinya di bidang-bidang di mana terdapat potensi konflik kepentingan, seperti yang berkaitan dengan pengadaan, transaksi pihak terkait, dan masalah remunerasi.

Dewan komisaris memainkan peran sentral dalam kerangka tata kelola perusahaan di Indonesia. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi, dalam rangka mengejar kepentingan dan tujuan perusahaan (ICGM, 2018). Kode CG menetapkan standar umum yang menyatakan bahwa dewan komisaris harus memiliki kapasitas untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan integritas, dan untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Pasal 1, dewan komisaris adalah emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Sebagaimana ditulis di Pasal 28 POJK No. 33/POJK.04/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dewan komisaris:

- (1) Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.
- (2) Dalam kondisi tertentu, dewan komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.





(3) Anggota dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

(4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya.

(5) Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Selanjutnya dalam Pasal 30 POJK No. 33/POJK.04/2014, diuraikan wewenang dewan komisaris sebagai berikut:

(1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

(2) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* menjabarkan tugas-tugas dewan komisaris sebagai berikut:

1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;

2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.



- 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
- 4) Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu;
- 5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

#### 5. Dewan Direksi (*Board of Directors*)

Setiap perusahaan wajib mempunyai jajaran dewan direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari (ICGM, 2018). Direksi adalah perwakilan hukum perusahaan yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), kecuali jika hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan atau direksi belum diangkat, dalam hal ini dewan komisaris dapat mengisi peran ini untuk sementara.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Pasal 1, dewan direksi adalah emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan direksi sebagaimana tertulis dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 12, 13, 14, dan 15 yaitu:

##### 1) Pasal 12

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.



(3) Setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

(4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.

(5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

### 2) Pasal 13

(1) Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.

(2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### 3) Pasal 14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

4) Pasal 15

(a) Direksi berwenang mewakili emiten atau perusahaan publik di dalam dan di luar pengadilan.

(b) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:

- a. Terdapat perkara di pengadilan antara emiten atau perusahaan publik dengan anggota direksi yang bersangkutan; dan
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan emiten atau perusahaan publik.

(c) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:

- a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan emiten atau perusahaan publik;
- b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan emiten atau perusahaan publik; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan emiten atau perusahaan publik.

Tanggung jawab direktur keuangan atas laporan keuangan perusahaan juga tercantum dalam

POJK No. 75 /POJK.04/2017 dengan isi sebagai berikut:

1) Pasal 5



Direksi emiten atau perusahaan publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (“Direksi emiten atau perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”), termasuk atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

## 2. Pasal 6

- (1) Dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, tanggung jawab direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sampai dengan tanggal pendapat akuntan.
- (2) Dalam hal laporan keuangan interim yang disampaikan tidak diaudit, tanggung jawab direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sampai dengan tanggal disampaikannya surat pernyataan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 6. Teori-teori yang Mendasari

### a. Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan atau kontrak antara satu atau lebih pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal (*principal*) dengan manajemen sebagai agen (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan principal, apabila kedua pihak dalam hubungan tersebut ingin memaksimalkan utilitas atau kebermanfaatan. Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang dari agen. Selain itu, dalam beberapa situasi ia akan membayar agen untuk mengeluarkan sumber daya (biaya pengikatan) untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengambil tindakan yang akan merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika dia melakukan tindakan yang merugikan. Namun, umumnya tidak mungkin bagi prinsipal atau



agen dengan *zero cost* untuk memastikan bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal.

Secara konseptual kesenjangan informasi antara manajer dengan pihak lain ini disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). Kesenjangan dalam informasi ini mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik dalam mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai perusahaan. Semakin besar *information asymmetry* semakin besar dorongan bagi manajer untuk berperilaku oportunistik. Hal ini dapat mengakibatkan manajer hanya akan mengungkapkan informasi tertentu ketika ada manfaat yang diperolehnya, sedangkan apabila tidak ada manfaat yang bisa diperolehnya maka manajer akan menyembunyikan atau menunda pengungkapan informasi itu, bahkan manajer akan mengubah atau memalsukan informasi. Scott (2015) membedakan dua jenis asimetri informasi sebagai berikut:

*Adverse selection* : jenis asimetri informasi di mana *adverse selection* terjadi karena ada beberapa orang, seperti manajer dan orang dalam lainnya yang memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi saat ini dan prospek masa depan perusahaan daripada investor luar. Beragam cara dapat dilakukan agar manajer dan orang dalam lainnya dapat memanfaatkan data keuntungan informasi yang mereka miliki dengan mengorbankan orang luar. Sebagai contoh, manajer dapat berperilaku oportunistik atau mengelola informasi yang dirilis ke investor, mungkin untuk meningkatkan nilai opsi saham yang mereka pegang. Mereka mungkin menunda atau melepaskan informasi secara selektif sejak dini kepada investor atau analis terpilih, memungkinkan orang dalam, termasuk diri mereka sendiri, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan investor. Tindakan semacam itu merugikan kepentingan investor, karena mengurangi kemampuan mereka untuk membuat keputusan investasi yang baik.

- *Moral hazard* : jenis asimetri yang muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol yang menjadi, ciri sebagian besar entitas bisnis. Secara efektif tidak mungkin bagi









Teori ini didukung dengan teori sumber daya manusia (*human capital theory*) yang membahas peran sumber daya pendidikan seseorang, pengalaman, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk kepentingan organisasi. Teori sumber daya manusia melingkupi beberapa konsep yang terkait dengan keragaman dewan yang berasal dari teori ketergantungan sumber daya. Keragaman menyebabkan adanya perbedaan peran di dewan. Bukti tentang sumber daya manusia wanita menunjukkan bahwa wanita juga memenuhi syarat seperti pria dalam beberapa hal penting yang terkait kualitas termasuk level pendidikan tetapi wanita kecil kemungkinannya memiliki pengalaman sebagai pakar bisnis (Terjesen *et al.*, 2009). Hasil akhir bahwa teori sumber daya manusia memprediksi bahwa kinerja dewan akan dipengaruhi oleh keragaman dewan sebagai akibat dari sumber daya manusia yang beragam dan unik tetapi efeknya bisa positif maupun negatif dari perspektif kinerja keuangan.

### **c. Resource Dependence Theory**

Teori ketergantungan sumber daya mendasari beberapa argumen teoritis yang paling meyakinkan untuk studi kasus bisnis untuk keragaman dewan. Keragaman memiliki potensi untuk meningkatkan informasi yang diberikan oleh dewan kepada manajer karena informasi unik yang dimiliki oleh beragam direktur. Perbedaan dalam gender dan etnisitas akan sangat mungkin menghasilkan informasi unik yang tersedia untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik (Carter *et al.*, 2010). Perpanjangan teori ketergantungan sumber daya menyarankan bahwa berbagai jenis direktur akan memberikan manfaat sumber daya yang berbeda untuk perusahaan. Akibatnya, dewan yang lebih beragam akan menyediakan sumber daya yang lebih bermanfaat, yang seharusnya menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik (Hillman *et al.*, 2000).

Teori ketergantungan sumber daya didukung oleh teori psikologi sosial (*social psychological theory*) yang membahas dinamika kelompok di dalam ruang rapat, dan memprediksi bahwa individu yang memiliki posisi mayoritas memiliki potensi untuk memberikan pengaruh yang tidak proporsional pada keputusan kelompok (de Cabo *et al.*,



2011). Oleh karena itu, menurut *social psychological theory*, minoritas dari beragam anggota dewan mungkin tidak mempengaruhi keputusan dewan (Carter *et al.*, 2010). *Social psychological theory* juga menunjukkan bahwa keragaman dewan direksi dapat berdampak positif pada dinamika kelompok dengan mendorong pemikiran yang berbeda. Ide yang berbeda dan beragam dapat berdampak positif pada proses pengambilan keputusan sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan (Westphal & Milton, 2000). Namun, Campbell & Mínguez-Vera (2008) menyarankan bahwa dewan direksi yang lebih beragam gender dapat menghasilkan pemikiran yang berbeda, dan dengan demikian kritis, yang dapat menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih memakan waktu dan kurang efektif. Teori psikologi sosial menunjukkan bahwa keragaman gender dewan dapat memiliki dampak positif dan negatif pada kinerja keuangan (Carter *et al.*, 2010).

#### d. **Feminism Theory**

Feminisme muncul untuk mendapatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, untuk meningkatkan status perempuan. Sebagai sebuah gerakan, feminisme memiliki beberapa cabang yang memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

Menurut Rosemarie Tong (2009), dalam buku *Feminist Thought*, feminisme liberal bukan tentang perempuan yang bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan laki-laki, tetapi lebih tentang beberapa perempuan yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Feminisme liberal menekankan pada kebebasan yang bisa didapatkan oleh perempuan. Artinya perempuan memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki, mereka dapat melakukan apa saja yang diinginkan oleh laki-laki, mereka dapat berekspresi tanpa batas dalam masyarakat. Perempuan dapat mengekspresikan dirinya dengan melakukan apa saja yang ingin dilakukan, karena perempuan setara dengan laki-laki, perempuan tidak memiliki batasan untuk melakukan sesuatu, mereka bebas berekspresi dengan pilihannya. Liberal menekankan pada pentingnya individu dan otonomi individu yang dilindungi oleh jaminan hak, keadilan ekonomi dan persamaan kesempatan (Tong, 2009).



Feminisme liberal juga menitikberatkan pada otonomi individu yang memiliki keadilan dan jaminan, sehingga perempuan dapat melakukan apa yang mereka inginkan tanpa ada gangguan karena apa yang mereka lakukan sudah sesuai dan terjamin.

Wanita sering menjadi objek pria dan digunakan untuk membuat pria senang. Karena perempuan diperlakukan sebagai objek laki-laki, berarti perempuan ditindas oleh masyarakat karena perempuan tidak berharga. Wanita melihat bahwa mereka lebih rendah daripada pria. Ini adalah salah satu alasan besar mengapa banyak orang ingin membuat kesempatan antara laki-laki dan perempuan setara, seperti yang dikatakan Wollstonecraft:

*“If the society is to achieve sexual equality, or gender justice, then society must provide women with the same political rights and economic opportunities as well as the same education that men enjoy.”*

Kesetaraan yang dimiliki laki-laki dan perempuan tidak hanya terkait dengan politik dan ekonomi, tetapi juga pendidikan. Masyarakat menuntut agar pendidikan tidak hanya diberikan kepada laki-laki, tetapi perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang sebaik laki-laki. Dengan mengenyam pendidikan, perempuan harus menjadi mitra suaminya, termasuk dalam mencari nafkah bagi keluarganya (Tong, 2009).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu peranan dewan komisaris wanita dan direktur keuangan wanita terhadap kualitas akrual laporan keuangan, dan peranan dewan komisaris wanita dan direktur keuangan wanita terhadap kinerja perusahaan.

### 1. Penelitian Terdahulu Tentang Peran Dewan Komisaris Wanita dan Direktur Keuangan Wanita Terhadap Kualitas Akrual Laporan Keuangan.

Penelitian Barua, *et al.* (2010) total menguji 2622 data (1174 dari tahun 2004 dan 1448 dari tahun 2005) perusahaan di Amerika yang memiliki data CFO wanita. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan dengan CFO wanita memiliki kualitas akrual yang lebih tinggi. Penelitian ini didukung oleh bukti dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa wanita lebih berhati-hati dan kurang agresif dalam berbagai pengaturan bisnis dan

© Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan. Jika wanita kurang agresif atau lebih berhati-hati, maka perusahaan dengan CFO wanita cenderung memiliki akrual abnormal absolut yang lebih rendah.

Penelitian Arun, *et al.* (2015) menguji perusahaan Inggris yang berada di daftar indeks FTSE 350 pada periode 2005 – 2011 dengan total sebanyak 1217 data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gender CFO berpengaruh terhadap kualitas akrual. Perusahaan dengan jumlah direktur wanita dan wanita independen yang lebih tinggi cenderung mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih konservatif dibandingkan dengan perusahaan dengan jumlah wanita dan CFO wanita independen yang lebih sedikit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Enofe, *et al.* (2017) kepada perusahaan sector finansial di Nigeria *Stock Exchange* menunjukkan bahwa dewan komisaris wanita tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, Enofe, *et al.* (2017) gagal menemukan bukti adanya pengaruh dewan komisaris wanita terhadap kualitas akrual laporan keuangan yang bisa dilihat dari tingkat manajemen laba.

Penelitian lainnya (Hala, 2019) menguji sebanyak 2046 data di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali sector keuangan pada periode 2012 hingga 2017. Penelitian ini menggunakan dua model, yaitu *Jones Model* dan *Kothari Model*. Dengan menggunakan *Jones Model*, ditemukan hasil bahwa dewan komisaris wanita tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan dengan *Kothari Model*, ditemukan bukti adanya dampak negatif dewan komisaris wanita terhadap manajemen laba. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya dewan komisaris wanita, manajemen laba yang dilakukan berkurang dan menunjukkan kualitas akrual laporan keuangan lebih baik. Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh positif wanita sebagai direktur keuangan dan komisaris terhadap kualitas akrual laporan keuangan perusahaan, baik menggunakan *Jones Model* maupun *Kothari Model*.

Penelitian Orazalin (2020) di perusahaan terbuka yang terdaftar di Kazakhstan *Stock Exchange* (KASE) pada periode 2010 sampai 2016 menunjukkan bahwa kehadiran wanita



sebagai dewan komisaris perusahaan mengurangi praktek manajemen laba yang harus dilakukan sehingga mengindikasikan laporan keuangan yang baik.

Penelitian yang dilakukan Utari *et al.* (2021) di 32 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019 menyimpulkan bahwa kehadiran dewan komisaris wanita efektif dalam mengurangi penyajian kembali laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya dewan komisaris wanita, *financial restatement* yang dilakukan perusahaan juga berkurang, dan mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan baik.

## 2. Penelitian Terdahulu Tentang Peran Dewan Komisaris Wanita dan Direktur Keuangan Wanita Terhadap Kinerja Perusahaan.

Penelitian Julizaerma & Sori (2012) di perusahaan yang terdapat di Main Bursa dan ACE Market Malaysia menghasilkan bukti bahwa direktur keuangan wanita memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan yang dihitung dengan *Return on Assets* (ROA). Berarti, semakin banyak jumlah wanita sebagai direktur keuangan perusahaan, maka semakin baik kinerja yang dimiliki oleh perusahaan.

Penelitian Lückerath-Rovers (2013) di perusahaan Belanda yang terdaftar di Amsterdam *Euronext Stock Exchange* pada periode 2005 hingga 2007 menyimpulkan bahwa dewan komisaris wanita dan direktur keuangan wanita terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan dihitung menggunakan *Return on Equity* (ROE).

Hasil penelitian Alm & Winberg (2016) di perusahaan Swedia yang terdaftar di *Stockholm Stock Exchange Nasdaq OMX* periode 2006 sampai 2011 menunjukkan bahwa jumlah wanita sebagai direktur keuangan dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik diukur dengan Tobin's Q maupun dengan ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Sanan (2016) di perusahaan terbuka India yang terdiri dari beberapa industri pada periode 2008 hingga 2009 dan 2012 hingga 2013 menunjukkan bukti bahwa direktur keuangan wanita meningkatkan ROA dan Tobin's Q. Hal ini menunjukkan



bahwa semakin besar proporsi direktur keuangan wanita di perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan ROA.

Penelitian Boukattaya & Omri (2018) di 81 perusahaan Prancis yang terdaftar di SBF120 selama periode 2011 hingga 2016 dengan total data observasi sebanyak 486 menghasilkan bukti bahwa kehadiran direktur keuangan wanita di perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan dengan baik. Pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan di penelitian ini yaitu Tobin's Q.

Peneliti Sabri *et al.* (2020) meneliti 50 perusahaan yang terdaftar di *Main Market of Malaysian Bourse* pada periode 2014 hingga 2018 dengan total data observasi sebanyak 250. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kehadiran direktur keuangan wanita yang positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA.

Ringkasan hasil penelitian terdahulu berikut pengukuran variabelnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh dewan komisaris wanita terhadap kualitas akrual laporan keuangan dan kinerja perusahaan.

##### a. Pengaruh Dewan Komisaris Wanita terhadap Kualitas Akrual Laporan Keuangan

Dewan komisaris wanita menunjukkan penghindaran risiko dan perilaku etis yang lebih besar (Riley & Chow, 1992), dan juga lebih baik dalam memperoleh informasi sukarela yang dapat mengurangi asimetri informasi (Srinidhi *et al.*, 2011). Dewan komisaris wanita adalah agen perubahan yang menyediakan platform kompetitif untuk mengubah kebijakan tradisional, dan mengembangkan mekanisme pemantauan yang kuat di mana CEO lebih akuntabel (Srinidhi *et al.*, 2011). Oleh karena itu, proporsi pakar keuangan wanita yang lebih tinggi di komite audit memiliki efek yang lebih nyata pada manajemen laba daripada rekan



pria mereka (Zalata *et al.*, 2018). Mendukung *Upper Echelon Theory*, karakteristik lain juga membuat direktur wanita lebih khas, seperti lebih menghindari risiko dan lebih konservatif dalam memilih kebijakan akuntansi (Faccio *et al.*, 2016), menjadi lebih peka terhadap etika (Ibrahim *et al.*, 2009), dan memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih transformasional (Burke & Collins, 2001). Dewan komisaris wanita memberikan wawasan yang lebih luas dan pemantauan yang lebih dekat, lebih aktif di dewan perusahaan, serta lebih cenderung mengajukan pertanyaan yang tidak akan ditanyakan oleh direktur (Abad *et al.*, 2017). Hasil penelitian terdahulu (Orazalin, 2020; Utari *et al.*, 2021) menemukan bahwa kehadiran wanita sebagai dewan komisaris perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap manajemen laba (*earnings management*), yang menunjukkan kualitas akrual laporan keuangan lebih baik.

#### b. Pengaruh Dewan Komisaris Wanita terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan komisaris menyediakan sarana dan struktur untuk tata kelola yang efektif dengan memfasilitasi tugas-tugas khusus dan menangani masalah perusahaan yang penting (Bilimoria & Piderit, 1994). Jiraporn *et al.* (2009) berpendapat bahwa efektivitas dewan dicapai melalui dewan komisaris. Keputusan paling penting dari dewan dimulai di tingkat komite (Kesner, 1988). Jika argumen tersebut benar, ada kemungkinan bahwa dewan komisaris yang beragam mungkin memiliki pengaruh lebih besar melalui komite dewan daripada keanggotaan dewan. Paling tidak, komposisi dewan komisaris memberikan cara yang berharga untuk menguatkan hubungan antara komposisi dewan dan kinerja perusahaan (Carter *et al.*, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Adams & Ferreira (2009) menyatakan bahwa kinerja perusahaan meningkat dengan adanya kehadiran dewan komisaris wanita, karena dewan komisaris wanita lebih sering menghadiri rapat komite pengawas sehingga lebih efektif dalam melakukan perannya untuk mengawasi pengelolaan perusahaan.

### 2. Pengaruh direktur keuangan wanita terhadap kualitas akrual laporan keuangan dan kinerja perusahaan.

#### a. Pengaruh Direktur Keuangan Wanita terhadap Kualitas Akrual Laporan Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam konteks bisnis, wanita lebih etis di tempat kerja dan lebih kecil kemungkinannya bagi wanita daripada pria untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak bermoral (Betz *et al.*, 1989), ini sejalan dengan teori agensi sehingga kecenderungan dalam perilaku *bonus plan hypothesis* berkurang. Perbedaan sensitivitas dan penghindaran resiko dalam gender juga dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan direktur keuangan karena informasi yang kaya dan unik yang dimiliki oleh beragam direktur (Orazalin, 2020). Hal ini sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya (*resource dependence theory*). Selain itu, menurut *social psychology theory*, wanita lebih berhati-hati dan kurang agresif daripada pria dalam berbagai konteks pengambilan keputusan, misalnya wanita cenderung memilih opsi yang kurang agresif dalam konteks investasi (Riley & Chow, 1992), CFO wanita lebih berhati-hati dalam mengevaluasi akuisisi dan penerbitan utang (Huang & Kisgen, 2013). Oleh karenanya, pendekatan manajemen laba yang terkendali memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk diterapkan (Arun, *et al.*, 2015). Hasil penelitian terdahulu (Barua, *et al.*, 2010; Gaviious *et al.*, 2012) menemukan bahwa kualitas akrual laporan keuangan perusahaan lebih tinggi ketika CEO atau CFO adalah wanita.

#### b. Pengaruh Direktur Keuangan Wanita terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan direktur atau dewan eksekutif yang lebih beragam mampu membuat keputusan berdasarkan evaluasi lebih banyak alternatif dibandingkan dengan dewan yang lebih homogen. Direktur keuangan wanita mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dari kehidupan kerja dan kehidupan non-kerja mereka dibandingkan dengan pria. Mereka mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik daripada pria tentang beberapa segmen pasar perusahaan, dan ini dapat meningkatkan kreativitas dan kualitas proses pengambilan keputusan perusahaan dewan perusahaan (Singh dan Vinnicombe, 2004). Pernyataan tersebut mendukung *human capital theory* yang membahas tentang pengalaman, pendidikan, dan keterampilan dalam organisasi. Jajaran direktur yang memiliki gender yang lebih beragam juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan dengan demikian memiliki efek positif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

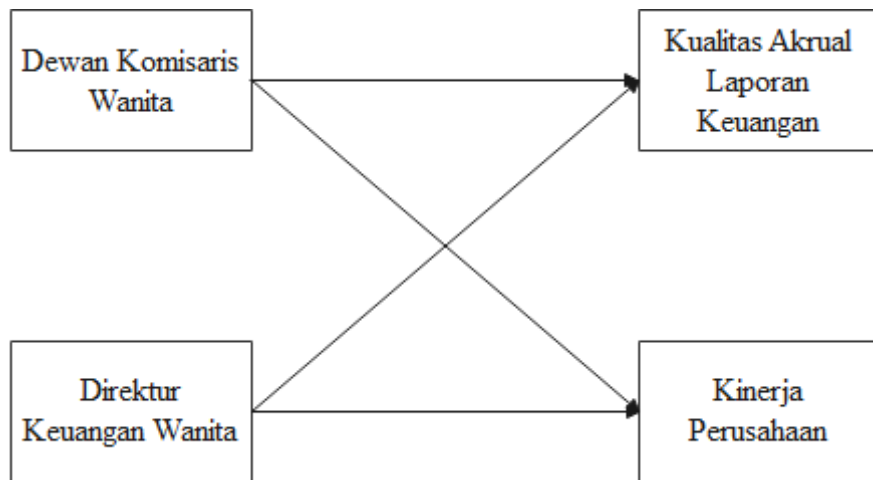




pada kinerja perusahaan. Beberapa peneliti (Lückerath-Rovers, 2013; Sanan, 2016; Boukattaya & Omri, 2018; Sabri, *et al.*, 2020) membuktikan bahwa kehadiran direktur wanita meningkatkan kinerja perusahaan dengan signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**Model Penelitian**



#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1a: dewan komisaris wanita berpengaruh terhadap kualitas akrual laporan keuangan.

H1b: dewan komisaris wanita berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

H2a: direktur keuangan wanita berpengaruh positif terhadap kualitas akrual laporan keuangan.

H2b: direktur keuangan wanita berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.